

TRANSFORMASI AKUNTANSI INDONESIA MELALUI KONVERGENSI IFRS

Sirajudin⁽¹⁾ dan Lea Emilia Farida⁽¹⁾

⁽¹⁾ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin

Ringkasan

Dalam SMO (Statement of Member Obligations) part 2, (yang merupakan sebuah rencana yang berisi program pengadopsian dan jadwal implementasi IFRS yang wajib dibuat oleh setiap anggota IFAC) pemerintah Indonesia melalui IAI telah memutuskan konvergensi atau pengadopsian secara penuh IFRS (International Financial Reporting Standard) di tahun 2012. Konvergensi tersebut tentunya akan membawa dampak bahwa seluruh standar atau aturan praktek profesi akuntansi (termasuk auditing) yang harus tunduk dengan prinsip, norma dan nilai pengukuran fair value (FV) yang ada dalam IFRS. Dengan mengadopsi IFRS tersebut maka pengguna laporan keuangan di berbagai belahan dunia dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antar negara. Terhitung sejak 1 Januari 2012, pelaporan keuangan di Indonesia akan merujuk pada IFRS. Makalah ini berusaha menjelaskan bahwa proses transformasi akuntansi Indonesia (konsep Historical Cost menjadi Fair Value) melalui konvergensi IFRS sudah terjadi sebelum proses legalnya.

Kata Kunci : IFRS, Fair Value dan Historical Cost

1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan bahasa bisnis utama di pasar modal. Dalam mekanisme pasar modal laporan keuangan menjadi produk utama. Dengan standar akuntansi yang baik maka pasar modal pun akan berjalan dengan baik pula. Semua *stakeholder* yakni para pekerja, *suppliers*, *customers*, institusi penyedia kredit, dan pemerintah memerlukan informasi keuangan yang transparan, tepat waktu, efektif dan relevan dari banyak perusahaan yang bisa diperbandingkan.

Sebelum tahun 2000an, dalam akuntansi, salah satu metode pengukuran yang selama ini dianggap paling baik atau unggul (dalam konteks Indonesia) adalah metode harga perolehan (*historical cost*) ketimbang metode harga sekarang (*current value*). Hal itu dikarenakan HC (*historical cost*) dianggap memiliki reliabilitas yang lebih tinggi karena menghasilkan angka-angka akuntansi yang didukung bukti transaksi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Setelah tahun 2000an seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, lingkungan akuntansi mengalami perubahan total yang dampaknya mempengaruhi biaya informasi (Roekhudin, 2010). Semua perkembangan tersebut menyebabkan transaksi antar negara atas barang dan berbagai faktor produksi lainnya berkembang pesat dan lebih likuid. Harus adanya basis data akan transaksi berbagai komoditas dengan harga jual komparatif memungkinkan orang membuat taksiran *fair value*. Para pelaku pasar menuntut kepada para akuntan untuk menyajikan

informasi yang lebih relevan yang mencerminkan harga terkini atas komoditas yang ditransaksikan. Disinilah mulai munculnya transformasi dari HC menuju FV yang didasarkan pada *current value* sebagai sebuah keniscayaan.

Pada tahun 2009, pro dan kontra serta kekhawatiran sehubungan dengan konvergensi IFRS sempat mencuat. Hal ini dikarenakan pada semester kedua 2008 di Amerika Serikat terjadi krisis keuangan yang dipicu oleh subprime mortgage dan fair value sempat dijadikan kambing hitam. Sistem akuntansi atau pelaporan keuangan yang menggunakan fair value atau nilai wajar —bukan lagi nilai buku berdasarkan pendekatan historical cost— inilah yang dituding sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan. Pihak-pihak terkait dan berwenang kemudian melakukan kajian untuk mencari jawaban atas pertanyaan seputar penerapan fair value sebagai penyebab krisis. Kemudian, Security Exchange Commission (SEC) atau pengawas pasar modal Amerika Serikat (AS) segera membentuk tim untuk melakukan kajian pada Desember 2008. Pada November, negara-negara yang tergabung dalam G-20 juga mengadakan pertemuan untuk melakukan kajian serupa, juga International Monetary Fund (IMF). Mereka memiliki kesimpulan studi yang sama, yakni tak ada bukti yang bisa menunjukkan bahwa fair value menjadi biang krisis. Bahkan hasil studi SEC menyebutkan, krisis bukan disebabkan fair value, melainkan oleh kegagalan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan di AS karena

probable credit losses, keraguan atas kualitas aset, dan turunnya kepercayaan kreditur maupun investor. Yang terjadi adalah kesalahan pengelolaan sehingga krisis tersebut menyeret dunia ke dalam krisis finansial global. Semua sepakat, termasuk IMF, untuk meneruskan penggunaan konsep fair value (Suharto, AI, 2009).

Mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Dalam konteks Indonesia, konvergensi IFRS tersebut merupakan hal yang sangat penting, selain untuk menjamin daya saing nasional, konvergensi tersebut berdampak terjadinya transformasi konsep HC menjadi FV dalam lingkup pelaporan keuangan. Konsep FV dinilai memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi dibandingkan HC, terlebih pada perusahaan yang *listing* di pasar modal.

Suatu perusahaan dinilai memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Banyak perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan terutama saat mereka memasuki pasar modal global. Namun menjelang diterapkannya konvergensi ini banyak komentar atau tanggapan para praktisi dan profesi yang terkait dengan akuntansi seputar dampak dan kesiapan mereka. Demikian juga dampak tersebut berpengaruh pada para praktisi pendidikan akuntansi.

Upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan, membuat IASB (*International Accounting Standard Board*) melakukan percepatan harmonisasi standar akuntansi internasional khususnya IFRS dan *Financial Accounting Standard Boards* (Badan Pembuat Standar Akuntansi di Amerika Serikat). Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), PSAK, atau lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. IFRS akan menjadi kompetensi wajib-baru bagi akuntan publik, penilai (*appraiser*), akuntan manajemen, regulator dan akuntan pendidik.

Kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009 menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi aturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan aturan di antara negara-negara anggota G-20. Oleh karena itu, IFRS telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia, Amerika Latin dan Australia. Di kawasan Asia, Hong Kong, Filipina dan Singapura pun telah mengadopsinya. Brasil, Kanada

dan India telah mengumumkan kewajiban untuk menggunakan IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara tersebut.

Sejak 2008, diperkirakan sekitar 80 negara mengharuskan perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek global menerapkan IFRS dalam mempersiapkan dan mempresentasikan laporan keuangannya. Pada tahun 2011 diperkirakan semua negara besar sudah mengadopsi IFRS dengan berbagai variasinya, China dan Jepang secara substansi akan menyesuaikan dengan IFRS dan perusahaan go public di Amerika Serikat akan mempunyai pilihan apakah menggunakan IFRS atau US GAAP. Pada bulan Desember 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Sejak tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah melaksanakan program kerja terkait dengan proses konvergensi tersebut sampai dengan tahun 2011. Ditargetkan bahwa pada tahun 2012, seluruh PSAK tidak memiliki beda material dengan IFRS. Setelah tahun 2012, PSAK akan di-*update* secara terus-menerus seiring adanya perubahan pada IFRS. Bukan hanya mengadopsi IFRS yang sudah terbit, DSAK-IAI juga bertekad untuk berperan aktif dalam pengembangan standar akuntansi dunia. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini berupaya menjelaskan telah disiapkannya proses transformasi akuntansi di Indonesia pada beberapa sektor/ bidang sehubungan dengan akan diadopsinya IFRS pada tahun 2012. Selain mulai disiapkannya beberapa perangkat teknis terkait pengukuran yang akan digunakan untuk IFRS.

2. KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi di Indonesia

Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Ia merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas [pajak](#) dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam [perusahaan](#), [organisasi](#), dan lembaga pemerintah. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal, yang dijumpai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin murah, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut. Standar akuntansi keuangan diharapkan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini.

Terkait hal tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan standar akuntansi sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini.

Pada 1973 merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku "Prinsip Akuntansi Indonesia" (PAI). Kemudian, pada tahun 1984 PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku "Prinsip Akuntansi Indonesia 1984" dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Selanjutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994."

Sejak tahun 1994, proses revisi telah dilakukan enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku "Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007" ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan revisi sebelumnya yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru, dan 5 PSAK revisi. Secara garis besar, sekarang ini terdapat 2 KDPPLK, 62 PSAK, dan 7 ISAK.

IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya hingga terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang direncanakan dapat terlaksana pada tahun 2012 mendatang.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International*

Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards/ IAS*) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Badan [Komite Standar Akuntansi Internasional/ *International Accounting Standards Committee* \(IASC\)](#)). Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih tanggung jawab guna menyusun Standar Akuntansi Internasional dari IASC.

Selama pertemuan pertamanya, Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS. Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Menurut Choi et al., (1999) dalam Intan Immanuel, IASB memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan. [Natawidnyana](#) (2008), menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan IAS. IAS diterbitkan antara tahun 1973-2001 oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.

International Accounting Standards yang lebih dikenal sebagai *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Boards* (IASB), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntansi berbasis prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan *disclosures* yang jelas juga terkait penggunaan konsep *Fair Value* yang transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut.

Dalam konsep pengukuran dengan *historical cost* (HC), sistem akuntansi dirancang untuk memudahkan fungsi akuntabilitas, maka pada konsep *fair value* (FV) sistem akuntansi didesain untuk memberikan informasi yang relevan atau bermanfaat (*information usefulness*) untuk pengambil keputusan ekonomis bagi pihak yang berkepentingan (Ijiri, 1975, ix). Sehingga adanya pergeseran tujuan pelaporan keuangan dari sebagai alat pertanggungjawaban menjadi alat penyuplai informasi untuk pengambilan keputusan, dimana hal ini juga menjadikan relevansi

lebih penting jika dibandingkan dengan reliabilitas (Roekhudin, 2010).

Fair Value Lebih Relevan

Memang selama ini, sistem akuntansi di Indonesia menggunakan konsep historical cost untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku itulah yang selama ini dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan, membeli sebuah tanah seharga Rp 70 juta, misalnya, bertahun-tahun kemudian, di dalam nilai buku atau book value, harga tanah itu sebagai aset akan tetap tertulis Rp 70 juta dengan menggunakan konsep historical cost meskipun di pasaran harganya sudah naik tiga-empat kali lipat. Melihat fenomena dan kondisi pasar yang makin dinamis berkembang dengan sangat cepat, konsep historical cost akhirnya dianggap tidak cocok lagi alias tidak relevan, karena ia tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya dan sebagai gantinya digunakanlah konsep fair value.

Sebenarnya yang pertama kali mengenalkan konsep fair value ini adalah Australia, Inggris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris. Pada awalnya, konsep ini digunakan untuk menghitung biological assets di lingkungan perusahaan perkebunan dan peternakan. Dengan pertimbangannya sederhana bahwa aset dan bidang usaha perusahaan-perusahaan tersebut adalah makhluk hidup, seperti tanaman dan ternak, yang terus berkembang dan berbiak. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut dinilai dengan nilai buku (historical cost), tentu tidak fair karena tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Dari kejadian tersebutlah kemudian ditemukan konsep penghitungan baru yang dikenal sebagai fair value. Kemudian konsep ini diadopsi ke dalam standar akuntansi internasional dan untuk pertama kalinya diberlakukan pada 2003 menilai aset-aset biologis di sektor agribisnis. Sejak saat itu pula semua perusahaan publik di Eropa menggunakan fair value untuk menyusun laporan keuangannya.

Menurut catatan Hinsa Siahaan sebagai Peneliti Madya Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI, SEC AS pada 1991 menggelar konferensi internasional yang melibatkan para pemimpin perusahaan dunia dari berbagai bidang, pakar dari berbagai perguruan tinggi, pembuat standar akuntansi, penyusun dan pemakai laporan keuangan, dan institusi pembuat kebijakan di seluruh dunia. Konferensi tersebut dimaksudkan untuk menjawab tantangan masalah keuangan dan akuntansi dengan mengambil tema "Relevance in Financial Reporting: Moving Toward Market Value Accounting". Konferensi tersebut, menurut Hinsa menyimpulkan bahwa akuntansi berbasis historical cost tidak mampu mendeteksi potensi-potensi kerugian yang ba-

kal terjadi karena tidak didasarkan pada nilai pasar yang berkembang. Sehingga, SEC AS kemudian merekomendasikan agar badan pembuat standar di negara tersebut mencari solusi dengan membuat standar akuntansi yang mengakomodasi atau berbasis nilai pasar. Akhirnya, akuntansi atau laporan keuangan yang disusun harus bisa mencerminkan kondisi atau dinamika pasar yang sebenarnya. Namun AS kemudian melangkah lebih jauh dalam penghitungan nilai pasar dengan fair value dimana standar akuntansi di AS atau GAAP, mengaturnya dengan sangat detail, rinci, dan kompleks. Berbeda dengan IFRS/IAS yang hanya memuat pedoman umum dalam penghitungan fair value. Meskipun sudah diwacanakan lebih dulu, ternyata AS baru menerapkan penghitungan fair value measurement secara penuh pada tahun 2007 dan mulai 2008, perusahaan-perusahaan besar atau lembaga-lembaga keuangan jatuh merugi. Kepercayaan pasar pun runtuh yang kemudian menyulut krisis keuangan global. Melirik kasus di atas, Pemerintah AS atau pihak yang berwenang sebenarnya bukannya tidak bisa memprediksi dampak yang akan terjadi atas pemberlakuan kebijakan baru tersebut, namun AS tidak akan mudah untuk "menjilat air ludahnya sendiri". (Suharto, AI, 2009)

Fair value dinilai sebagai konsep yang paling pas dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya. Namun, tak mudah untuk menentukan nilai dengan pasar yang beragam, aktif atau tidak aktif. Secara umum, fair value atau nilai wajar adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan serta akuntansi yang merupakan estimasi rasional dan tidak bias atas harga pasar potensial dari barang, jasa, atau aset dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelangkaan (scarcity), karakteristik risiko, replacement cost, serta biaya produksi dan distribusi, termasuk cost of capital. Dalam pengertian standar akuntansi, menurut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Jusuf Wibisona, fair value wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm's length transactions). Dalam standar akuntansi keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, konsep fair value ini memiliki tiga hierarki, yaitu (1) quoted prices at active markets, (2) no active market, valuation techniques, dan (3) no market equities cost. Yang dinilai melalui fair value pun tidak hanya meliputi aset dan instrumen keuangan lainnya, melainkan juga kewajiban suatu perusahaan atau entitas bisnis.

Dalam menentukan nilai pada pasar aktif, mudah dilakukan dengan kuotasi harga di pasar, sedangkan pada pasar tidak aktif penentuan nilai bisa dilakukan sesuai hierarki fair value tersebut yakni bisa menggunakan transaksi-transaksi wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan. Bisa juga menggunakan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama atau menggunakan analisis arus kas yang didis-konto (*discounted cash flow analysis*) serta model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian utamanya berdasarkan pada asumsi internal manajemen mengenai future cash flow dan *appropriately risk-adjusted discount rates*. Atau, bisa menggunakan kuotasi broker untuk dijadikan input tapi tidak determinatif, dan tidak mengandalkan kuotasi broker jika dinilai tidak mencerminkan nilai wajar. Jadi, di pasar yang tidak aktif, memang memerlukan keahlian tersendiri untuk menentukan nilai wajar secara cepat dan tepat. (Suharto, Al, 2009)

3. PEMBAHASAN

Standar akuntansi di Indonesia sebentar lagi akan menggunakan secara penuh (*full adoption*) standar akuntansi internasional atau *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. Sedangkan standar akuntansi yang berlaku saat ini masih banyak mengacu kepada US GAAP (*United States Generally Accepted Accounting Standard*), namun pada beberapa pasal ternyata sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi (karena sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian).

Di era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor. Namun dalam proses harmonisasi ini ternyata ada hambatannya antara lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Diadopsinya IFRS ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan me-

iliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2005). Untuk Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau *full adoption* (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Walaupun untuk perbankan diharapkan sudah diterapkan sejak tahun 2010.

Melalui partisipasi global, IFRS diharapkan menjadi standar akuntansi berbasis teori dan prinsip yang berkualitas tinggi. Penerapan standar akuntansi yang sama di seluruh dunia akan mengurangi masalah-masalah terkait daya banding (*comparability*) dalam pelaporan keuangan. Investor dan kreditor trans-nasional serta badan-badan internasional menjadi sangat menguntungkan. Perubahan tata cara pelaporan keuangan dari *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, PSAK, atau lainnya ke IFRS berdampak sangat luas. Penerapan IFRS ini juga akan berdampak pada pembelajaran pada program studi Akuntansi di Indonesia. Berarti ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah mempersiapkan buku teks yang mendukung. Karena saat ini banyak buku pencatatan keuangan yang belum sesuai dengan IFRS. Selain itu, penerapan IFRS ini juga berdampak pada perubahan materi kuliah di prodi akuntansi seperti mata kuliah akuntansi internasional. Mata kuliah akuntansi internasional ini yang biasa membandingkan praktek akuntansi di berbagai negara juga harus membahas mengenai IFRS. Selain itu, mata kuliah akuntansi lainnya juga harus melakukan *up date* materi tentang perubahan PSAK dari waktu ke waktu.

Bagi pelaku bisnis pada umumnya, implementasi IFRS membutuhkan investasi yang besar di bidang sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengikuti persyaratan yang diharuskan. Hal ini berarti adopsi IFRS membutuhkan biaya, energi dan waktu yang tidak ringan, tetapi biaya untuk tidak mengadopsinya akan jauh lebih signifikan. Dengan demikian, komitmen manajemen perusahaan Indonesia untuk mengadopsi IFRS menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di masa mendatang.

Fair Value Lebih Relevan & Menjadikan Laporan Keuangan Lebih Transparan

Para peneliti yang mengungkapkan relevansi FV sudah banyak dan diantaranya adalah Barth (1991) yang mencoba mengungkapkan

metode pengukuran aset dan kewajiban dana pensiun sebagaimana yang diatur dalam SFAS 87, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran metode mana yang disukai oleh investor ketika menilai perusahaan. Pada tahun 1994, Barth menemukan bahwa FV mampu menjelaskan secara signifikan jika dibandingkan dengan HC untuk investasi pada suat berharga tetapi tidak untuk keuntungan atau kerugian investasi dalam sekuritas yang diakibatkan kurangnya reliabilitas pengukuran FV (Roekhudin, 2010).

Petroni dan Wahlen (1995) dalam penelitiannya tentang pengukuran FV untuk perusahaan asuransi, seperti yang dikutip Choy (2006), menemukan bahwa FV mampu menjelaskan lebih baik jika dibandingkan dengan HC untuk investasi pada saham dan obligasi pemerintah AS, tetapi bukan pada jenis investasi lainnya.

Selain itu, menurut M. Yusuf Wibisana selaku Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, hampir seluruh Pedoman Standar Akuntansi (PSAK) revisi yang diterbitkan akhir-akhir ini sudah mengadopsi fair value accounting. Misalnya PSAK 30 tentang Sewa beserta PSAK 8, PSAK 13 tentang Properti Investasi, PSAK 16 tentang Aset Tetap, dan PSAK 50 dan 55 tentang Instrumen Keuangan. Perlu diketahui bahwa hampir seluruh Pronouncement the International Accounting Standard Board sudah menggunakan dasar fair value. Sehingga transformasi konsep HC menuju konsep FV sudah dilakukan dengan perlahan sebelum dikongruensinya IFRS di tahun 2012. Bahkan menurut Hamid Yusuf selaku Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, sejak 2002 sudah dimasukkannya FV dalam penilaian standar akuntansi pada saat melaksanakan pekerjaan mereka sebagai penilai atau appraiser.

Menurut Ricky Ichsan (senior manager pada PT Batavia Properindo Sekuritas), konsep fair value akan menguntungkan pelaku pasar atau investor karena memang mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan informasi pasarnya terkini, selalu up date. Hanya saja akan ada kesulitan untuk menilai pasar yang tidak aktif. Hal senada dengan ungkapkan Jusuf Wibisana dimana menurutnya, fair value memiliki tiga keunggulan, yaitu laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk dasar pengambilan keputusan; meningkatkan keterbandingan laporan keuangan; dan informasi lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, potensi laba/rugi sebuah perusahaan jauh-jauh hari sudah bisa diprediksikan.

Meskipun secara penuh IFRS baru akan diterapkan 2012, dalam beberapa kasus atau entitas konsep fair value ini di Indonesia sebenarnya sudah diterapkan. Saham yang diperdagangkan di pasar modal penilaiannya sudah

menggunakan fair value karena sudah mengikuti harga pasar. Adapun untuk penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan publik (PP) atau emiten, oleh Bapepam-LK, konsep fair value baru diterapkan tahun 2009. Sedangkan di lingkungan dana pensiun, fair value juga sudah mulai diterapkan dengan DSAK yang masih memberi opsi kepada pengelola dana pensiun untuk menggunakan hold to maturity, atau mark to market alias fair value. Dan penerapannya harus konsisten.

Manfaat dan Tujuan Konvergensi IFRS

Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Dudi M Kurniawan, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, antara lain:

1. meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK);
2. mengurangi biaya SAK;
3. meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan;
4. meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan;
5. meningkatkan transparansi keuangan;
6. menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal; dan
7. meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan menurut Wibisana (2009) sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, manfaat konvergensi IFRS adalah :

1. memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability);
2. meningkatkan arus investasi global melalui transparansi; dan
3. menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global.

Adapun dampak IFRS terhadap bisnis menurut Wibisana (2009) yaitu :

1. akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global;
2. relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar. Disisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
3. smoothing income menjadi semakin sulit dengan menggunakan balance sheet approach dan fair value; dan
4. principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan

professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management).

4. PENUTUP

Simpulan

Penerapan IFRS mulai 1 Januari 2012 di Indonesia perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional. Konvergensi ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Dampak lainnya adalah terjadinya pergeseran paradigma konsep akuntansi yang selama ini menggunakan harga perolehan atau historical cost menjadi paradigma fair value. Dan ini adalah sudah tuntutan perkembangan usaha dewasa ini yang tidak bisa dihindari.

Saran

1. *Sumber daya manusia manusia yang tersedia di kalangan bisnis maupun dunia pendidikan memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penguasaan IFRS.*
2. Peningkatan integritas mutlak diperlukan karena SAK bersifat principle-based dan memerlukan professional judgment.
3. Infrastruktur IT harus disiapkan untuk mendukung beberapa PSAK yang kompleks seperti PSAK 50 & 55.
4. Harus ada keterlibatan lebih intensif dari kalangan akademisi dan universitas dalam mengkaji isu-isu terkait IFRS
5. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki unit gugus tugas (*task force*) atau lembaga khusus yang bertugas memantau perkembangan ekonomi dan dinamika penyusunan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di kancah internasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim, (2007), Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007, IAI, Jakarta
2. Anggraini F.R.R., (2009). Nilai Wajar Saham pada Kualitas Laba. Manajemen dan Bisnis, Vol 8, No. 1.
3. Barlev, B. & Haddad, J.R. (2003). Fair value accounting and the management of the firm. *Critical Perspectives on Accounting*, vol.14, 383-415.
4. Barth, M.E., Landsman, W.R. & Wahlen, J.M. (1995). Fair value accounting: Effects on banks' earnings volatility, regulatory capital and value of contractual cash flows. *Journal of Banking and Finance*, 19, 577-605.

5. Chairiri A. dan Hendro S.K.S., (2010). Menguji Kualitas Standar Akuntansi Hasil Adopsi IFRS : Studi Empiris pada PSAK No 55 (Revisi 2006). SNA XIII, Purwokerto
6. Choy, A.K., (2006). Fair Value as a Relevant Metric : A Theoretical Investigation, Washington University, Paper 1-56
7. Deegan, C., (2004). *Financial Accounting Theory*. McGraw-Hill, Australia.
8. Gamayuni R.R., (2009). Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia menuju IFRS. *Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulan* ISSN 1410-1831 Vol 14 No. 2.
9. <http://www.iasplus.com/standard/ifrs03.htm>
10. <http://www.kabarindonesia.com>
11. <http://swa.co.id/2010/01/adopsi-ifrs-untuk-daya-saing-di-masa-depan/>
12. http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Pelaporan_Keuangan_Internasional
13. <http://www.omy.ac.id/2012-pencatatan-keuangan-indonesia-gunakan-ifrs.h>
14. <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi> diunduh pada 13 Juni 2011
15. <http://staff.undip.ac.id/akuntansi/anis/2011/03/28/akuntansi-indonesia-sejarah-standar-akuntansi-keuangan/> diunduh pada 13 Juni 2011
16. Immanuela, I., (2009). Adopsi Penuh dan Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional, *Jurnal Ilmiah Widya Warta*, Vol 33, No 1, Madiun.
17. Maruli, S. dan Mita A.F., (2010). Analisis Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis Dalam Penilaian Aset Biologis Pada Perusahaan Agrikultur: Tinjauan Kritis Rencana Adopsi IAS. 41. SNA XIII, Purwokerto
18. Roekhudin, (2010). Makna Fair Value Measurement (FVM's) bagi Auditor dalam Perspektif Pengadopsian IFRS, Malang
19. Siahaan H., (2009). Implikasi dan Permasalahan dalam Mengimplementasikan Konsep Nilai Wajar dalam Kondisi Ekonomi Saat Ini. Seminar IAPI, Jakarta
20. Suharto, H., (2009). *Akuntan Indonesia* edisi April, Jakarta
21. Sunder, Shyam, (2008). Econometrics of fair values. *Accounting Horizons*, 22 no.1, 111-125.
22. Wibisana, M.J., (2009). Seminar "Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia", Ikatan Akuntan Indonesia, Malang